

**PENGATURAN REKONSTRUKSI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak)**

Oleh:

**JUDA TRISNO TAMPUBOLON, SH., S.IK.
NPM.A21212018**

**Pembimbing I : Dr. Marcus Lukman, SH., MH
Pembimbing II : Paulus Nyangkar Sufmana, SH., M.Si**

ABSTRACT

This thesis addresses the issue of reconstruction settings as evidence in the investigation (Study In Pontianak Police Jurisdiction). From the results of research using normative legal research methods, we concluded that the arrangements regarding the reconstruction of criminal cases in the criminal procedure law in Indonesia is carried out at the level of investigation in the Criminal Code is not found explicitly or terang-terangan because the Criminal Procedure Code only regulates the general provisions of the investigations so that as a further elaboration was issued SK National Police chief No.Pol.Skep / 1205 / IX / 2000 on the Revised Guidelines and technical Guidance Association process by the Directorate of investigation crime investigation Police Headquarters who then set about the reconstruction as a technique of examination in order investigation of a criminal case. The reconstruction of a criminal case in Pontianak Police assist in the investigation of an offense, namely to clarify the criminal offenses committed by suspects with the way reenact how the suspect committed the crime or on the witness knowledge helps give confidence to investigators in connection with the crime that happened. Disampingitu, the constraints felt by the Pontianak Police investigating authorities in the reconstruction came from suspects, witnesses and the general public so as to anticipate, then the Pontianak Police investigators made several attempts including, tighten security suspects, tighten the security of witnesses and move the location of reconstruction. Rekomendasi of this is the view of the role of the reconstruction of criminal cases are quite important, the authors argue that reconstruction criminal cases serve as a legal product standard and has its own settings in the provisions of the criminal procedure law Indonesia. Dalam implement reconstruction, the investigating authorities should more actively to promote the purpose and the objective of reconstruction to the general public so that people know and understand that preventing people to perform acts that disrupt the reconstruction. And good things are done away sebelum menggelar reconstruction by maximizing the function of Guidance (guidance community) that exist within the police force.

Keywords: reconstruction as evidence in the investigation process

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah pengaturan rekonstruksi sebagai alat bukti dalam proses penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan bahwa Pengaturan mengenai rekonstruksi perkara pidana dalam hukum acara pidana di Indonesia yang dilakukan pada tingkat penyidikan dalam KUHAP memang tidak ditemukan secara eksplisit atau terangterangan karena KUHAP hanya mengatur ketentuan-ketentuan umum dari penyidikan sehingga sebagai penjabaran lebih lanjut dikeluarkanlah SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Direktorat Reserse Mabes Polri yang kemudian mengatur mengenai rekonstruksi sebagai tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan suatu perkara pidana. Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Polresta Pontianak membantu dalam proses penyidikan suatu tindak pidana, yakni untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau atas pengetahuan saksi membantu memberi keyakinan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Disamping itu, kendala yang dirasakan oleh pihak penyidik Polresta Pontianak dalam melakukan rekonstruksi berasal dari tersangka, saksi dan masyarakat umum sehingga untuk mengantisipasinya, maka penyidik Polresta Pontianak melakukan beberapa upaya diantaranya, memperketat pengamanan tersangka, memperketat pengamanan saksi dan memindahkan lokasi pelaksanaan rekonstruksi. Rekomendasi dari ini adalah Mengingat peran rekonstruksi perkara pidana yang cukup penting, maka penulis berpendapat agar rekonstruksi perkara pidana dijadikan sebagai produk hukum yang baku dan memiliki pengaturan tersendiri dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia. Dalam melaksanakan rekonstruksi, hendaknya aparat penyidik lebih aktif untuk mensosialisasikan maksud serta tujuan dilakukannya rekonstruksi kepada masyarakat luas agar masyarakat mengerti dan memahami hal tersebut sehingga mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu jalannya rekonstruksi. Dan baiknya hal tersebut dilakukan jauh sebelum menggelar rekonstruksi dengan memaksimalkan fungsi bimas (bimbingan masyarakat) yang ada di tubuh kepolisian.

Kata Kunci: rekonstruksi sebagai alat bukti dalam proses penyidikan

Latar Belakang

Rekonstruksi dalam kasus tindak pidana pembunuhan sangat lazim dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti telah dilakukannya suatu tindak pidana pembunuhan oleh tersangka. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, dan e. keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.

Rekonstruksi sebagai alat bukti tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, tetapi tersirat dalam pasal 75 ayat (1) huruf lc KUHAP yang membenarkan adanya pelaksanaan **tindakan lain** sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Implementasi dari pelaksanaan tindakan lain itu selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan tindak pidana, tanggal 11 September 2000. Intinya menentukan: “**Metode pemeriksaan terhadap tersangka** dapat menggunakan teknik: (1) interview; (2) interogasi; (3) konfrontasi; dan (4) **rekonstruksi**. Karena itu, menurut Surat Keputusan Kapolri tersebut rekonstruksi hanyalah sebagai salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana. Tetapi tidak dijelaskan atau tidak dirinci secara detil apakah rekonstruksi harus dilakukan pada setiap kasus tindak pidana umum ataupun khusus? Dalam praktik yang sering dilakukan rekonstruksi hanyalah terhadap tindak pidana pembunuhan.

Pada **Bab III angka 8.3.a** Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/IX/2000 yang mengatur **Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana** menyebutkan: “Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan **keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti** maupun tentang **unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi**, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam **Berita Acara Pemeriksaan**.”

Persoalan yang mengedepan apakah rekonstruksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP? Kemudian apakah tanpa melakukan rekonstruksi, hasil penyidikan tindak pidana pembunuhan menjadi kurang kuat atau tidak sah?

Secara yuridis rekonstruksi yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara oleh penyidik Polri, memiliki keterkaitan yang erat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang KUHP, terutama mengenai “asas praduga tak bersalah” dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHP yang menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 66 KUHP menentukan : “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Karena itu, penyidiklah yang berkewajiban bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka dan Penuntut umum yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa.

Karena tersangka tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan, maka ia dapat menolak untuk melakukan rekonstruksi. Hal ini juga sesuai dengan pengaturan Bab III angka 8.3.e.6 Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan: “Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan.”

Jika tersangka menolak untuk melakukan rekonstruksi, penyidik dilarang untuk menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun untuk memaksa tersangka melakukannya. Hal ini juga terkait dengan asas *non-self incrimination*, yaitu seseorang tersangka/terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan (termasuk dalam bentuk rekonstruksi) yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan.

Selanjutnya sesuai Bab III angka 8.3.d jo. angka 8.3.a Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana, hasil pemeriksaan rekonstruksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika hasil pemeriksaan rekonstruksi yang dituangkan dalam BAP merupakan hasil rekayasa, pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa, oleh Penyidik/Penuntut Umum, maka dapat dilakukan upaya hukum praperadilan oleh pihak tersangka.

Karena itu, rekonstruksi harus dilakukan secara benar agar dapat menopang/memperkuat pembuktian dalam perkara pidana. Sungguhpun demikian, dalam praktiknya rekonstruksi hanya dilakukan terhadap tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana pembunuhan. Di wilayah Polres Pontianak sejak tahun 2012 sampai tahun 2014, telah terjadi kasus tindak pidana pembunuhan sebanyak 40 kasus. Terhadap kasus tersebut telah dilakukan rekonstruksi sebanyak 5 kasus. Hal ini menunjukkan rekonstruksi telah dijadikan salah satu alat bukti yang menguatkan telah dilakukannya tindak pidana oleh si pelaku. Karena itu, ke depan perlu digagas agar rekonstruksi memiliki kekuatan hukum yang mengikat hendaknya dapat diformulasikan ke dalam salah satu pasal atau penjelasan salah satu pasal dari KUHP yang mengatur alat bukti.

Permasalahan

1. Bagaimana kekuatan mengikat rekonstruksi sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polresta Pontianak?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan rekonstruksi sebagai alat bukti dalam rangka pembaharuan KUHAP?

Pembahasan

Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak.

Rekonstruksi perkara pidana sebagai suatu tehnik pemeriksaan dalam proses penyidikan yang dilaksanakan pada tahap pemeriksaan pendahuluan berasal dari praktek yang dijalankan oleh pihak kepolisian. Inisiatif pemeriksa dalam hal ini penyidik kepolisian untuk melakukan reka ulang suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali gerak serta cara dan alat yang digunakan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan langsung oleh tersangka, berdasarkan keterangan yang diberikan olehnya dan juga keterangan saksi pada saat kejadian berlangsung merupakan suatu upaya pihak penyidik dalam rangka memenuhi tujuan hukum acara pidana yakni mencari dan menemukan kebenaran materiil artinya kebenaran yang sesungguhnya dari suatu tindak pidana.

Hal tersebut penting karena dalam rangka menemukan suatu kebenaran sejati tentang peristiwa pidana, tidak saja dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan tetapi juga dilakukan pada tahap pemeriksaan lanjutan di depan sidang pengadilan.

Mengenai cara-cara yang dilakukan dalam proses pemeriksaan tersebut memang tidak ada ditemukan dalam KUHAP secara defenitif satu persatu khususnya cara-cara yang digunakan penyidik pada tingkat penyidikan di kepolisian. Oleh karena itu pihak penyidik dalam prakteknya melakukan berbagai tehnik pemeriksaan guna mengungkap terjadinya suatu tindak pidana. Polres Deli Serdang melalui Satuan Reserse Kriminal Unit Idik juga melakukan rekonstruksi dalam proses penyidikannya terhadap kasus-kasus yang memang dianggap perlu dilakukan hal tersebut. (*Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Pontianak*).

Latar belakang pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Polresta Pontianak ialah didasarkan pada SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi himpunan Juklak dan juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Buku petunjuk juklak dan juknis tersebut memang hanya berlaku di kalangan kepolisian saja. Namun, meskipun

demikian tidak menjadi perdebatan mengenai daya lakunya, sejauh tujuannya selaras dengan KUHAP dalam rangka menemukan kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana.

Di Polresta Pontianak sendiri, perkara pidana yang dilakukan rekonstruksinya bersifat selektif artinya tidak semua perkara yang masuk dilakukan reka ulang adegannya. Berdasarkan data yang diperoleh, maka rekonstruksi hanya dilaksanakan untuk tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Berikut merupakan data pelaksanaan rekonstruksi di Polresta Pontianak:

Tabel Jumlah Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana Pembunuhan di Polresta Pontianak

No	Tahun	Jumlah kasus	Rekonstruksi	Keterangan
1	2012	11	1	Pembunuhan
2	2013	15	2	Pembunuhan
3	2014	14	2	Pembunuhan
	Jumlah	40	5	Pembunuhan

Sumber : Kepolisian Polresta Pontianak

Dari tabel tersebut diketahui, bahwa jumlah pelaksanaan rekonstruksi di Polresta Pontianak hanya dilakukan sebanyak 5 kali untuk tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2014.

Namun, jika dicermati maka rekonstruksi yang digelar di Polresta Pontianak hanya dilakukan untuk tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah tergolong kedalam kasus yang berat dan rumit, oleh karena itu rekonstruksi dilakukan agar supaya teori yang ditarik dalam kasus itu dapat lebih dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain walaupun tersangka pembunuhan telah mengakui bahwa ia adalah pembunuh sebenarnya, rekonstruksi tetap dilakukan karena penyidik tetap harus memiliki alternatif bahwa belum tentu tersangka jujur dalam memberikan keterangannya, bisa saja ia menutupi hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya. *(Wawancara dengan Penyidik pada Polresta Pontianak)*

B. Pelaksanaan Rekonstruksi untuk Membantu Proses Penyidikan di Polresta Pontianak

Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Polresta Pontianak memang memiliki peranan tersendiri dalam proses penyidikan. Dengan dilakukannya rekonstruksi, maka hal tersebut membantu dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana yang terjadi. Secara garis besar, peranan digelar rekonstruksi perkara pidana oleh pihak penyidik tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yakni :

1. Memperjelas Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Tersangka

Di Polresta Pontianak sendiri, rekonstruksi diadakan untuk tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam tindak pidana pembunuhan, tersangka sering sekali memberikan keterangan yang berbelit-belit kepada petugas dan menutupi hal-hal seperti motif atau alasan dia membunuh, cara yang dilakukannya termasuk peran rekannya dalam pembunuhan tersebut. Bahkan, tersangka dalam beberapa kasus pembunuhan tidak signifikan dalam memberikan keterangan kepada penyidik mengenai alat yang digunakannya untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Hal ini yang membawa petugas pemeriksa untuk menggelar rekonstruksi guna mendapat kejelasan dari keterangan tersangka tersebut, karena pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Polres Polresta Pontianak sendiri tidak memaksa tersangka untuk mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya dalam arti tidak mengejar pengakuan tersangka. Disini jelas terlihat bagaimana penyidik reskrim Polresta Pontianak menghormati hak-hak tersangka dan memberlakukan asas praduga tak bersalah kepada tersangka.

Pelaksanaan rekonstruksi untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pihak Polresta Pontianak dikarenakan kasus tersebut memerlukan penjabaran yang detail mengenai tindakan sebelum tindak pidana dilakukan, selagi tindak pidana dilakukan, dan setelah tindak pidana dilakukan. Sebelum mengadakan rekonstruksi, penyidik perlu mengumpulkan berbagai macam bukti seperti buktibukti fisik saat di TKP. Bukti-bukti fisik itu dapat berupa barang bukti seperti senjata atau alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, setelah melakukan tindak pidana, tapak kaki, sidik jari, posisi korban waktu ditemukan dan lain sebagainya. (*Wawancara dengan Penyidik pada Polresta Pontianak*).

Rekonstruksi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan cara mencocokkan bukti-bukti, keterangan saksi, bahkan bilamana tersangka mengakui perbuatannya, maka hendaknya dicocokkan dengan pengakuannya. Sebaliknya, bilamana tersangka menyangkal terus, maka rekonstruksi itu akan merupakan batu

ujian apakah sangkalan-sangkalan itu beralasan atau tidak.

Dari menggelar rekonstruksi tersebut, maka nantinya dapat memperjelas tindak pidana yang dilakukan tersangka. Hal ini terlihat pada kasus pembunuhan diatas dimana keterangan tersangka dan saksi yang telah diperoleh kemudian dicocokkan dan dianalisa bagian-bagian yang sama juga berbeda pada waktu rekonstruksi dilakukan.

Setelah melakukan rekonstruksi dibuat berita acara pemeriksaan rekonstruksi dan dibuat foto rekonstruksi pada setiap adegan, lebih baik dengan menggunakan kamera video, dan jangan berita acara terlebih dahulu dibuat baru dilakukan rekonstruksi. Hal ini guna mengantisipasi timbulnya perbedaan antara adegan-adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi dengan berita acara rekonstruksi yang dibuat terlebih dahulu. (*Wawancara dengan Penyidik pada Polresta Pontianak*)

Setiap adegan rekonstruksi dianalisa, dan manakala ada perbedaan antara keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan pelaksanaan rekonstruksi, penyidik wajib melakukan pemeriksaan tambahan. Agar memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, data yang cukup dan benar, maka hasil-hasil pemeriksaan tersangka atau saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dievaluasi guna mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan berikutnya ataupun untuk membuat suatu kesimpulan dari pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan penyidikan yang telah dilakukan. Adapun proses dari pada evaluasi meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

a. Tahap Inventarisasi

Penyidik/penyidik pembantu berusaha menarik dan mengumpulkan semua keterangan-keterangan yang benar-benar mengarah kepada unsur-unsur pasal tindak pidana sebanyak mungkin.

b. Tahap Seleksi

Dari keterangan-keterangan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diseleksi untuk mencari keterangan-keterangan yang ada relevansinya dengan peristiwa pidana yang terjadi dan mempunyai hubungan yang logis.

c. Tahap Pengkajian

1). Dari keterangan-keterangan yang telah diseleksi tersebut

penyidik/penyidik pembantu mengkaji, dan menguji kebenarannya dengan bukti-bukti serta petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah keterangan tersebut betulbetul dapat dipercaya, dengan cara :

(1) Menilai adanya persesuaian untuk keterangan saksi

(2) Menilai adanya persesuaian keterangan saksi dengan keterangan ahli dan bukti yang ada

(3) Adanya alasan yang logis dari setiap keterangan saksi

2). Keterangan-keterangan yang telah dianggap benar tersebut satu dengan lainnya kemudian dihubungkan dengan alat bukti lainnya, apakah terdapat persesuaian satu dengan yang lain.

Setelah diperoleh gambaran atau konstruksi perkara pidananya secara bulat, maka dapat diketahui :

1. Bahwa benar peristiwa tindak pidana telah terjadi
2. Peranan dari masing-masing tersangka yang terlibat
3. Siapa-siapa saksinya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan
4. Barang/benda yang menjadi barang bukti
5. Dari hasil evaluasi tersebut, penyidik/penyidik pembantu dapat menyusun resume.

Dalam rangka pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Polres Pontianak, umumnya hal tersebut tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan oleh seluruh pihak. Aparat penyidik dalam melakukan reka ulang kejadian suatu tindak pidana ternyata mengalami hambatan atau kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Hambatan yang bersifat internal maksudnya hambatan tersebut berkenaan langsung dengan terjadinya suatu perkara pidana, dalam hal ini yakni tersangka dan saksi. Sedangkan hambatan yang bersifat eksternal maksudnya yakni hambatan tersebut berasal dari luar dan tidak bersinggungan dengan terjadinya suatu tindak pidana secara langsung, yang dalam hal ini berasal dari masyarakat umum.

a.) Hambatan internal, terdiri atas :

1. Tersangka

Pelaksanaan suatu rekonstruksi perkara pidana, jelas tidak dapat dipisahkan dengan

tersangka, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tersangka merupakan kunci dari suatu tindak pidana yang terjadi. Keterangan tersangka pada saat proses penyidikan sangat diperlukan dalam hal mengungkap tindak pidana yang dilakukannya. Keterangan tersangka merupakan informasi yang berharga bagi penyidik dalam menyusun teori dan menerapkan unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang sedang ditanganinya. Walaupun tersangka memberikan keterangan yang tidak benar, bukan berarti penyidik dapat memperlakukan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan seenaknya, kepadanya harus diberikan kebebasan untuk mengakui atau menyangkal atas tuduhan-tuduhan pidana yang dipersangkakan kepadanya, hal ini sejalan dengan prinsip pemeriksaan yang dianut yakni prinsip *accusatoir*, dimana tersangka diperlakukan sebagai subjek. Dengan demikian seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana harus dihormati dan dihargai kedudukannya sebagai seseorang yang memiliki harkat dan martabat dalam proses penyidikan, dan penyidik selama dalam proses penyidikan berkewajiban menganggap tersangka tidak bersalah. Prinsip *accusatoir* yang kita anut sangat erat kaitannya dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Asas ini dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.’

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip pemeriksaan *accusatoir* dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penyidik harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang *inquisitoir*, yakni menempatkan tersangka dalam setiap pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Terlebih, KUHAP telah memberikan seperangkat hak-hak kepada tersangka/terdakwa mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68 dan pasal-pasal lainnya. Hak-hak tersebut meliputi :

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1),(2),(3) KUHAP)
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP)
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52)
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1))

- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP). Mengenai hak untuk mendapat bantuan hukum, ini berarti bahwa oleh karena hanya merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kepada kemauan tersangka atau terdakwa. Dia dapat mempergunakan hak tersebut, tapi bisa juga tidak mempergunakan hak itu. Konsekuensinya, tanpa didampingi oleh penasihat hukum, tidak menghalangi jalannya pemeriksaan tersangka atau terdakwa. Lain halnya jika kualitas mendapatkan bantuan hukum itu bersifat wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum akan menempatkan setiap tingkat pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Lebih-lebih lagi pada tingkat penyidikan keikutsertaan seorang penasihat hukum hanya bersifat fakultatif dan pasif sebagai dikatakan pasal 115 KUHAP, (1) dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan, jadi kedudukan dan kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan tidak lebih sebagai seorang penonton. Namun demikian, pengaruh kehadiran seorang penasihat hukum tetap ada, sebab dengan kehadiran seorang penasihat hukum akan memberikan kehati-hatian bagi penyidik dalam melakukan pemeriksaan.
- f. Tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya
- g. Wajib mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bagi yang tidak mampu diancam lima tahun atau lebih, dengan biaya cuma-cuma (Pasal 56).
- h. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).
- i. Hak menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58).
- j. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan 60).
- k. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61)
- l. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)
- m. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
- n. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (a de charge) (Pasal 65)
- o. Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67)
- p. Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 68)

Hak-hak tersangka tersebut di atas juga dibacakan oleh penyidik sebelum rekonstruksi digelar agar tersangka mengetahui dan memahaminya.

Kembali ke dalam pokok pembahasan kendala yang dialami oleh pihak penyidik dalam melakukan rekonstruksi perkara pidana, dalam hal ini hambatan yang berasal dari tersangka, tersangka sering bertindak mangkir bahkan menolak untuk melakukan reka ulang tindak pidana yang dilakukannya. Keengganan tersangka dalam melakukan rekonstruksi tindak pidana yang telah dilakukannya dikarenakan tersangka menganggap keterangan yang diberikannya kepada pihak penyidik dinilai sudah cukup tanpa harus melakukannya kembali adegan tindak pidana tersebut. Keengganan tersebut juga karena tersangka bukanlah pelaku yang sebenarnya sehingga ia menolak melakukan reka

adegan perbuatan yang tidak dilakukannya.(Wawancara dengan Penyidik pada Polresta Pontianak).

Terlebih penolakan tersangka untuk dilakukannya rekonstruksi disebabkan kekhawatirannya atas keselamatan dirinya dari amarah masyarakat yang menyaksikan rekonstruksi tersebut.

Hal-hal yang demikian menghambat kerja penyidik dalam merekonstruksi suatu perkara pidana sehingga pemeriksaan pada proses penyidikan berjalan lambat dan memakan waktu yang tidak sedikit.

2. Saksi

Hambatan berikutnya dalam pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Polresta Pontianak datang dari saksi. Saksi sering tidak mau datang dalam hal pihak penyidik akan melakukan rekonstruksi, hal tersebut dikarenakan saksi merasa keterangannya pada pihak penyidik sudah cukup membantu dalam proses penyidikan. Keengganan saksi untuk hadir dalam melakukan reka ulang peristiwa pidana dirasa sangat tidak efisien oleh aparat penyidik, karena penyidik harus kembali memanggil saksi agar mau hadir dalam pelaksanaan rekonstruksi guna memperhatikan tersangka dalam melakukan adegan ulang apakah sesuai dengan yang diketahuinya atau tidak. Apakah ada yang ditutupi atau disamarkan oleh tersangka atau tidak. Tidak jarang pihak penyidik menggunakan saksi pengganti dalam hal saksi tidak mau hadir. (Wawancara dengan Penyidik pada Polresta Pontianak).

Ketentuan mengenai saksi pengganti dalam pelaksanaan rekonstruksi memang tidak ada pengaturannya, saksi pengganti biasanya dilakokan oleh petugas Polresta Pontianak lainnya bahkan pihak penyidik membayar masyarakat umum untuk menjadi saksi pengganti.

Jika diperhatikan, memang terasa aneh jika saksi harus digantikan perannya oleh orang lain dalam melaksanakan rekonstruksi, mengingat saksi adalah orang yang melihat, mendengar serta mengalami sendiri suatu tindak pidana. Namun, berdasarkan keterangan yang diberikan pihak penyidik Polresta Pontianak maka diketahui bahwa meskipun adegan dilakukan oleh saksi pengganti, tapi tetap mengacu pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebelum rekonstruksi tersebut digelar. Bahkan, sebelum dilaksungkannya rekonstruksi perkara pidana yang dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum dari tersangka pihak penyidik telah melakukan pra rekonstruksi yang sifatnya tertutup dan dilakukan di tempat pemeriksaan pada saat tersangka maupun saksi memberikan keterangannya.(Wawancara dengan Penyidik pada Polresta

Pontianak).

2. Memberi Keyakinan Kepada Penyidik Tentang Tindak Pidana yang Terjadi.

Pemeriksaan rekonstruksi di Polresta Pontianak dilakukan untuk menguji keterangan yang telah diberikan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk memberikan gambaran yang lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang duduk kejadian yang sebenarnya atau tentang kebenaran keterangan yang diperoleh baik dari saksi maupun tersangka dengan cara, kepada tersangka diperintahkan untuk memperagakan kembali bagaimana cara tersangka melakukan tindak pidana itu. *(Wawancara dengan Penyidik pada Polresta Pontianak).*

Hal tersebut dilakukan karena biasanya pada saat pemeriksaan tersangka dan saksi, penyidik sudah dapat memperoleh bayangan tentang duduk perkara tersebut. Pada kasus pembunuhan yang dilakukan rekonstruksi perkara pidananya misalnya maka penyidik pada waktu memeriksa dan meminta keterangan dari saksi dan tersangka sudah dapat membayangkan bagaimana tindak pidana tersebut berlangsung, bagaimana tersangka melakukan tindak pidana itu dan bagaimana saksi yang menyaksikan tindak pidana tersebut mengambil sikap begitu juga dengan alat yang digunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain, penyidik sudah memperoleh gambaran tentang bentuk serta kualifikasi dari alat yang digunakan tersangka tersebut untuk menghabisi nyawa orang lain termasuk caracara tersangka. *(Wawancara dengan Penyidik pada Polresta Pontianak pada hari Selasa).*

Dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan saksi tersebut, maka penyidik sudah memiliki teori atau gambaran sehubungan dengan terjadinya tindak pidana itu. Dan untuk memantapkan teori penyidik tersebut dilakukanlah rekonstruksi yang juga dilaksanakan untuk memberikan keyakinan kepada penyidik mengenai gambaran yang diterimanya melalui keterangan saksi dan keterangan tersangka tersebut.

Lebih lanjut, rekonstruksi dipergunakan untuk menguji kebenaran teori yang dipakai oleh penyidik, apakah rekonstruksi sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya telah terjadi, dengan itu hendak ditentukan apakah tempat kejadian adalah sesuai dengan keterangan saksi dan apakah semua bukti dapat mendukung kebenaran terjadinya peristiwa pidana. Bagaimanakah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tersangka dan bilamana menyangkut tersangka teori tentang modus operandi, apakah perbuatan yang telah terjadi sesuai dengan pola operandi yang dimaksud.

Kesimpulan

Pengaturan mengenai rekonstruksi perkara pidana dalam hukum acara pidana di Indonesia yang dilakukan pada tingkat penyidikan dalam KUHAP memang tidak ditemukan secara eksplisit atau terangterangan karena KUHAP hanya mengatur ketentuan-ketentuan umum dari penyidikan sehingga sebagai penjabaran lebih lanjut dikeluarkanlah SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Direktorat Reserse Mabes Polri yang kemudian mengatur mengenai rekonstruksi sebagai tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan suatu perkara pidana.

Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Polresta Pontianak membantu dalam proses penyidikan suatu tindak pidana, yakni untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau atas pengetahuan saksi membantu memberi keyakinan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Disampingitu, kendala yang dirasakan oleh pihak penyidik Polresta Pontianak dalam melakukan rekonstruksi berasal dari tersangka, saksi dan masyarakat umum sehingga untuk mengantisipasinya, maka penyidik Polresta Pontianak melakukan beberapa upaya diantaranya, memperketat pengamanan tersangka, memperketat pengamanan saksi dan memindahkan lokasi pelaksanaan rekonstruksi.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1991. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- _____, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1.
- _____, 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana.
- _____, 2008. Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang.
- _____, 2008. RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
- _____, 2009. Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bawengan, Gerson. W, 1983. Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Pradnya Paramita.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHM- PTHM.
- Hartono Hadisoepipto, 1982. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta : Bina Aksara.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007. Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Restu Agung.
- Jan Remmelink, 2003. Hukum Pidana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- J.M. van Bemmelen, 1979. Hukum Pidana 1, Bandung: Binacipta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru.

Moeljatno, 1985. Hukum Pidana Delik-delik Percobaan delik-delik Penyertaan, Jakarta : Bina Aksara.

_____, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme Bina Cipta, Bandung, 1996.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.

R Tresna, tt. Komentar HIR, Jakarta : Pradnya Paramita.

S. Schaffmeister, dkk, 1995. Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty.

R.Soesilo, 1984. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Bogor : Politia.

Satochid Kartanegara, tt. Hukum Pidana I & II (Kumpulan Kuliah), Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa.

Satjipto Rahardjo, tt. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN, Departemen Kehakiman, tt, Jakarta: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat,, Jakarta : Rajawali Pers.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.

Sudarto, 1990. Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto.

Sutan Remy Sjahdeini, 2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1969. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco.

_____, 1986. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : PT Eresco.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Kapolri Nomor : 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.